

Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas

Florensia Silaban¹, Iwain Nababan², Seevaira Chyta Simanullang³, Julia Ivanna⁴

Abstrak: Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi. Begitu juga dengan Indonesia yang menerapkan pemilu sebagai perwujudan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi di kelurahan selambo kecamatan Medan Amplas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasilnya pemilihan umum di kelurahan Medan Amplas sudah berjalan dengan baik dan menjadi bagian pemerintah guna melaksanakan demokrasi. Hal ini dapat terealisasi karna dalam pelaksanaannya pemerintah dan masyarakat telah memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Demokrasi, Peran Pemerintah.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah kata yang sering diucapkan, namun semakin sering dibahas, semakin sulit menemukan contoh negara yang benar-benar menerapkan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian sosok demokrasi terus dilakukan, baik dalam praktik politik maupun kajian akademis. Dalam kajian akademis, sejumlah makalah dibahas secara mendalam dalam berbagai seminar. Sementara itu, sejumlah buku, artikel, dan pidato para pakar dan politisi telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran, dan majalah.

Di Indonesia, perbincangan tentang demokrasi tidak hanya karena bangsa atau pemerintahannya tidak mengenal demokrasi. Justru sebaliknya, bangsa Indonesia telah memahami berbagai varian demokrasi di dunia. Beberapa varian demokrasi bahkan telah diujicobakan di Indonesia, seperti demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Namun, berbagai varian demokrasi ini tidak mampu mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi.

Setelah era reformasi dimulai, masyarakat Indonesia berharap akan tercipta tatanan politik yang demokratis. Namun, setelah hampir lima tahun berjalan, praktik-praktik politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum sesuai dengan harapan reformasi. Demokrasi pun kemudian dipertanyakan dan digugat karena sejumlah praktik politik yang mengatasnamakan demokrasi justru menunjukkan paradoks dan ironi. Gugatan terhadap demokrasi ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan sosiologi politik bangsa Indonesia. Tulisan ini akan membahas perjalanan demokrasi di Indonesia, kemudian menganalisis prospek demokrasi di masa depan dengan mengambil contoh kasus Pemilu dan Pilkada.

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum dilakukan secara reguler untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan adanya pemilihan umum, sebuah negara dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, meskipun praktik politik di negara tersebut belum sepenuhnya demokratis. Pemilihan umum tetap dijalankan meskipun praktik politik di negara tersebut

belum sepenuhnya demokratis karena merupakan tuntutan normatif dalam demokrasi. Dalam praktiknya, pemilihan umum menjadi sarana bagi para kandidat untuk meraih jabatan-jabatan publik, mulai dari anggota legislatif hingga presiden.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya dan memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. Pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya melibatkan kepentingan rakyat dan pemerintah, tetapi juga kepentingan politik para pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan pemilihan umum sebagai fenomena yang unik. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik dengan menggunakan hak pilihnya maupun dengan memanfaatkan pemilihan umum sebagai peluang bisnis. Pemilihan umum tidak hanya memiliki implikasi politik, tetapi juga implikasi sosial. Pemilihan umum dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan memberikan arti penting bagi masyarakat. Pemilihan umum dapat mencerminkan kesadaran politik masyarakat melalui kompetisi antar partai politik, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dan penggunaan hak politik oleh masyarakat. Pemilihan umum juga dapat mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam merespon pemilihan umum.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial yang ditelitinya. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145). Metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial.

Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Amplas kecamatan Medan Amplas, penulis dapat menguraikan tentang penerapan Pemilu sebagai perwujudan Demokrasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa penerapan pemilihan umum di daerah Kelurahan Amplas sudah berlangsung dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan peneliti kepada narasumber. Hasil yang diperoleh yaitu

1. Bahwa masyarakat Kecamatan Amplas, sampai saat ini partisipasinya sangat antusias, seperti pendataan yang dilakukan oleh petugas yang namanya-namanya belum masuk dalam kategori pemilih, melalui laporan warga, itulah yang menjadi partisipasi daripada warga Kecamatan Amplas dalam pemilihan umum.
2. Selama ini pemilihan sudah pernah dilakukan, berarti warga ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan baik pemilihan gubernur, walikota, kalau kita berpartisipasi di wilayah kelurahan amplas melalui pemilihan kepala daerah
3. Sampai saat ini pendataan sudah dilakukan oleh tim petugas, ikut sertanya masyarakat contohnya seperti warga yang baru tamat SMA dan baru memenuhi syarat

umur minimal pemilih, tapi selama ini belum memiliki E-KTP. Warga yang seperti ini termasuk dalam pemilih pemula. Hal ini termasuk dalam partisipasi masyarakat yang antusias untuk agar ikut pemilih baru ikut dalam pesta demokrasi yang besar ini di negara Republik Indonesia.

4. Pada saat partisipasi masyarakat masih sampai antusias karena pemilihan terakhir sudah lama dan sedang menunggu kegiatan pemilihan selanjutnya. Sehingga belum terlihat isu tantangan yang paling relevan saat ini.
5. Media dan informasi sangat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan karena melalui media, pemerintah dapat memberikan informasi terkait bagaimana proses berlangsungnya pemilihan.
6. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa generasi muda seperti anak SMA, antusiasnya sangat tinggi, misalnya dengan berbondong-bondong mendaftarkan diri membuat KTP sebagai salah satu syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum, sehingga mereka berhak untuk memilih salah satu calon.
7. Sampai saat ini kegiatan pemilihan kan masih aman dan terkendali dan masih aman dan tidak ada riak-riak seperti demonstrasi dan masih stabil. Jadi tenang seperti yang kita tengok selama ini kan tidak ada riak-riak, seperti demonstrasi, dan masih stabil serta kondusif.

KESIMPULAN

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum dilakukan secara reguler untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemilihan umum yang dilakukan di Kelurahan Amplas kecamatan Medan Amplas sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syarat syarat pemilu. Dilihat dari partisipasi dan antusias masyarakat untuk mempersiapkan dan mengikuti Pemilihan Umum yang akan berlangsung di tahun selanjutnya. Bentuk keantusiasan masyarakat di Kelurahan Amplas dapat dilihat dengan para generasi muda sebagai pemilih pemula yang mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan selanjutnya dengan mengurus E-KTP sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilihan.

REFERENCES

- Bulqiyah Hasanul dkk (2019). Pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat marjinal: studi kasus di pulau Belawan, Indonesia. Universitas Brawijaya. Malang
- Sarbaini (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokrasi Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia. Universitas Batanghari. Jambi
- Wakhid Ali (2017). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang Undangan. Jurnal TAPI. Vol. 13
- Purnawen Hartati (2004). Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3 No. 2
- Hastuti Sri (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. Jurnal Hukum. Vol.11 No. 25.